



MODERASI ISLAMIC WORK ETHICS DI ANTARA DETERMINAN FAKTOR SENJANGAN ANGGARAN

Ismail Kurniawan, Andi Wawo, Puspita Hardianti Anwar

¹UIN Alauddin Makassar

Surel: ismailkurniawan@gmail.com, andiwawo@gmail.com,
puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 1
Halaman 29-45
Samata, Juni 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
17 April 2021

Tanggal Diterima:
25 Juni 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran dengan *Islamic work ethic* sebagai variabel moderasi di seluruh kantor desa Kecamatan Rilau' Ale Kab. Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran namun asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Selain itu *Islamic work ethic* mampu memoderasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran namun partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak dapat dimoderasi oleh *Islamic work ethic*.

Kata Kunci: partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, asimetri informasi, senjangan anggaran, *Islamic work ethic*

This study aims to determine the effect of budget participation, environmental uncertainty, and information asymmetry on budgetary slack with Islamic work ethic as a moderating variable in all village offices, Rilau' Ale District, Kab. Bulukumba. This type of research is quantitative research. The results showed that budgetary participation and environmental uncertainty had a positive effect on budgetary slack, but information asymmetry had no effect on budgetary slack. In addition, Islamic work ethic is able to moderate the relationship between environmental uncertainty and budgetary slack, but budget participation and information asymmetry cannot be moderated by Islamic work ethic.

Keywords: budget participation, environmental uncertainty, information asymmetry, budgetary slack, *Islamic work ethic*

Copyright: Kurniawan, Ismail., Wawo, Andi., Anwar, P. Hardianti. (2021). Moderasi Islamic Work Ethics Di Antara Determinan Faktor Senjangan Anggaran. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (29-45). <https://doi.org/jiap.v6i1>.

PENDAHULUAN

Aturan mengenai pengelolaan dana desa dijelaskan dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mencantumkan peraturan tentang keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Terkait dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan bahwa alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindak lanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini diperuntuhkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud (penahan tanah agar tidak longsor) dan juga yang dapat mendorong peningkatan jumlah pendapatan masyarakat dalam kurung waktu satu tahun.

Dana desa adalah bagian yang paling penting dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Kepala Desa dalam mengemban tugasnya harus mengelola keuangan dan aset yang dimiliki oleh desa dengan akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Yasa et al., 2017). Fenomena yang banyak terjadi sekarang ini dalam sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban pelayanan publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Wulandari (2017), tuntutan masyarakat yang sering muncul salah satunya kurangnya transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan hak-hak masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran di sektor swasta. Sektor swasta, anggaran merupakan bagian yang dirahasiakan oleh perusahaan dan tertutup untuk umum tapi di sektor publik, bagaimanapun, anggaran harus dikomunikasikan kepada publik sehingga dapat dikritik dan didiskusikan untuk mendapatkan masukan (Islami, 2016). Sehingga setiap pemerintah desa harus tetap

memperhatikan prinsip keterbukaan dalam menyusun anggaran sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh Dr. Hikmat Basyir et al. janganlah kamu mengikuti, wahai manusia, apa yang tidak kamu ketahui, tapi pastikan dan cek kebenarannya. Sesungguhnya manusia itu akan diminta pertanggung jawaban terhadap pendengaran, penglihatan dan hatinya yang telah dipergunakannya dalam kebajikan, maka ia mendapatkan pahala. Dan jika ia mempergunakannya dalam keburukan, maka ia mendapatkan siksa. Anggaran yang disusun oleh partisipasi anggaran harus mendahulukan kepentingan umum dengan mempertimbangkan semua aturan yang berlaku. Selain itu partisipan anggaran juga dianjurkan untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan agar mampu mencapai tujuan anggaran yang efektif dan efisien dengan berbagai pertimbangan faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran.

Perusahaan ataupun organisasi memiliki target atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang, salah satu caranya yaitu dengan cara menyusun perencanaan anggaran. Menurut Arista & Syofyan (2019) dalam sebuah organisasi baik itu pemerintah maupun swasta anggaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan agar strategi yang ditetapkan dapat dijadikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan anggaran adalah salah satu bentuk perencanaan yang pasti, khususnya dalam sektor pemerintahan, dalam hal ini pemerintah desa. Proses penyusunan anggaran perlu memperhatikan pihak-pihak yang berpartisipasi, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah (Puspitasari et al., 2017). Proses penyusunan anggaran pada pemerintah desa melibatkan banyak partisipasi baik dari aparat pemerintah desa sebagai unsur eksekutif, badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif, maupun masyarakat (Yasa et al., 2017). Keberhasilan proses penyusunan anggaran salah satunya dapat dipengaruhi oleh sikap/perilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran (Ilfan, 2018).

Pada proses penyusunan anggaran itu sendiri, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan yang sering muncul adalah terjadinya senjangan anggaran. Menurut I. K. Y. A. Putra & Putri (2016), senjangan anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Kelonggaran anggaran (senjangan anggaran) atau menutup anggaran (*padding the budget*) muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja (Nst & Kiyah, 2019). Menurut Young (1985), senjangan anggaran didefinisikan sebagai jumlah di mana seorang bawahan mengecilkan kemampuan produktifnya ketika diberi kesempatan untuk memilih standar kerja yang akan dievaluasi. Apabila dikaitkan

dengan teori keagenan, partisipasi anggaran merupakan proses kerja sama antara manajer tingkat bawah selaku agen dan manajer tingkat atas selaku prinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran (Arista & Syofyan, 2019).

Kecamatan Rilau Ale' merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 14 Desa. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Rilau Ale' ada 5 desa yang mempublikasikan laporan realisasi anggarannya terindikasi mengalami senjangan anggaran. Terdapat Senjangan anggaran antara jumlah anggaran pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan yang terealisasi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kire & Oematan (2019) senjangan anggaran merupakan selisih yang timbul antara jumlah yang dianggarkan dengan yang direalisasikan.

Mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan anggaran desa dapat membantu mengurangi rasa curiga masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah desa serta menambah informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa, dengan kata lain akan menambah jumlah partisipasi anggaran. Menurut Windiani et al. (2018) partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seharusnya mampu menurunkan senjangan anggaran serta meningkatkan kinerja karena telah disepakati melalui keselarasan tujuan, sehingga kecil kesempatan untuk melakukan penetapan anggaran untuk kepentingan pribadi (Puspitasari et al., 2017). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya partisipasi anggaran itulah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya senjangan anggaran. Terdapat perilaku-perilaku manusia yang mungkin timbul sebagai akibat dari partisipasi anggaran. Menurut Agustini et al. (2019) perilaku yang positif dapat berupa peningkatan kinerja bawahan sedangkan perilaku negatif yang mungkin timbul adalah kecenderungan bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran. Sedangkan Lubis & Arfan (2010:241), mengemukakan bahwa senjangan anggaran adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan secara efisien dan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut.

Variabel ke tiga yaitu ketidakpastian lingkungan, dimana variabel ini mampu memberikan efek yang luar biasa terhadap setiap karyawan dari luar dirinya. Menurut Rahim & Rahim (2019) ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mencerminkan rasa ragu yang dialami manajer saat menghadapi masalah memprediksi kondisi persaingan di masa depan (N. P. D. L. S. Wati & Damayanthi, 2017). Menurut Sulistyowati (2019)

ketidakpastian menggambarkan kadar kompleksitas lingkungan. Kadar kompleksitas mengacu kepada jumlah komponen dalam sebuah lingkungan organisasi dan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi itu tentang komponen-komponen tadi. Kompleksitas itu diukur pula dalam rangka pengetahuan yang dibutuhkan sebuah organisasi mengenai lingkungannya.

Variabel terakhir adalah asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi perbedaan tingkat informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan mengenai suatu hal (Pradita & Haryanto, 2017). Asimetri informasi terjadi akibat seorang bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasannya serta seorang bawahan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi, sehingga seorang bawahan akan memberikan informasi yang bias dengan cara melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan, serta membuat target anggaran yang mudah tercapai sehingga dapat memicu terjadinya senjangan anggaran (Kusniawati & Lahaya, 2017). Menurut Hikmahwati et al. (2018) bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan, namun karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan, maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, serta membuat budget yang mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran (yaitu dengan melaporkan anggaran di bawah kinerja yang diharapkan).

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan, maka dalam penelitian ini kami mencoba untuk memberikan satu variabel moderasi yang diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap variabel bebas dalam mengurangi jumlah senjangan anggaran. Variabel moderasinya adalah Islamic work ethics (etika kerja Islam). Menurut Pradana & Mikhriani (2017), Islamic work ethics adalah seperangkat nilai yang bersumber dari Al Quran dan hadist Nabi yang membentuk orientasi mukmin dalam bekerja dan interaksi sosial dengan lingkungan kerjanya sesuai dengan syariat Islam. Islamic work ethics memandang tujuan bekerja tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan pribadi dan hubungan social (A. R. Putri, 2018). Etika kerja yang bagus yang dimiliki oleh karyawan pada suatu perusahaan akan membuahkan efektifitas dalam bekerja, tanggungjawab, dan keinginan untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya, sehingga dalam skala global akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para peneliti bahwa Islamic work ethics berpengaruh kepada kinerja karyawan (Sodiq, 2018). Menurut Wulansari (2012) dan Iksan (2013) Berkembangnya usaha gadai syariah di Indonesia menyebabkan dibutuhkannya suatu standar akuntansi yaitu PSAK khusus untuk gadai syariah agar terjadi keselarasan dalam industri tersebut yang

didalamnya diatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari gadai syariah (rahn).

Fenomena yang kemudian muncul bersama dengan hadirnya Pegadaian Syariah adalah di mana masih banyak pegawai yang tidak paham dengan hukum serta konsep pembiayaan syariah sehingga penerapan PSAK No. 107 tentang ijarah atau gadai syariah menjadi terhambat dan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi yang dilakukan dengan yang telah ditetapkan dalam standar (Auliyah, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan ditahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) pada tulisan yang berjudul "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure". Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Basyir (2016) teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Praktik kesenjangan anggaran dari perspektif teori keagenan dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen dan prinsipal ketika masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan suatu level kemakmuran yang diinginkan. Apabila dikaitkan dengan teori keagenan, partisipasi anggaran merupakan proses kerjasama antara manajer tingkat bawah selaku aseen dan manajer tingkat atas selaku prinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran (Arista & Syofyan, 2019).

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini tidak terlepas dari perilaku orang dalam organisasi, yaitu perilaku pimpinan dan perilaku bawahan (Bestari, 2016). Menurut Puspitasari et al. (2017) ketika aparat penyusun anggaran memandang bahwa faktor-faktor penentu berada dalam kendali individu maka individu akan cenderung bertindak untuk secara optimal memengaruhi organisasi agar dapat mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, ketika pandangannya adalah faktor pengendali tersebut berada di luar kendali organisasi (exsternal force), maka individu akan merasa tidak cukup kuat untuk memengaruhi orgaisasi dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai. Keterkaitan teori dengan penelitian ini adalah variabel moderasi yaitu Islamic work ethics mampu mempengaruhi sikap dari setiap partisipasi anggaran dalam

menyusun anggaran demi meningkatkan tingkat efisiensi pengelolaan dana desa.

Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran adalah perbedaan jumlah atau selisih anggaran yang telah ditetapkan pada saat proses penyusunan anggaran dan jumlah anggaran yang terealisasi sampai pada akhir periode. Menurut (Kusniawati & Lahaya, 2017) senjangan anggaran merupakan kendala yang paling sering muncul dalam suatu proses penyusunan anggaran, yang mengakibatkan hilangnya estimasi terbaik dari anggaran itu sendiri yang berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. Selain itu, senjangan anggaran juga dipandang sebagai mekanisme yang digunakan oleh manajer bagian untuk melindunginya dari perlakuan buruk dari manajemen tingkat atas karena target anggaran yang tidak tercapai (Baryatdika et al., 2019). Menurut Hikmahwati et al. (2018) banyak pembuat anggaran cenderung menganggarkan pendapatan yang lebih rendah dan pengeluaran yang lebih tinggi dari estimasi terbaik yang diajukan. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Sama halnya yang dikemukakan oleh Sari et al. (2019) ketika terjadi senjangan anggaran, agen akan lebih condong menyerahkan anggaran dengan pendapatan yang direndahkan dan juga biaya dinaikkan, dengan demikian sasaran lebih mudah untuk dicapai.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Arista & Syofyan, 2019). Menurut Kire & Oematan (2019) keterlibatan (partisipasi) berbagai pihak dalam membuat keputusan dapat terjadi dalam penyusunan anggaran, dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja manajer di bawahnya akan meningkat, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga mempunyai rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. Artinya senjangan anggaran terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang bias dengan cara melaporkan biaya yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah agar target anggaran tercapai (I. G. E. D. Putra & Mintoyuwono, 2017). Sehingga dikatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan proses dimana pihak-pihak tertentu terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan berpengaruh dalam penetapan anggaran itu sendiri.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merupakan, (1) ketiadaan informasi tentang faktor-faktor lingkungan yang berhubungan dengan situasi

pengambilan keputusan, (2) tidak diketahuinya outcome dari keputusan tertentu tentang seberapa besar perusahaan akan mengalami kerugian jika keputusan yang diambil ternyata salah, dan (3) ketidakmampuan untuk menilai kemungkinan. Pada berbagai tingkat keyakinan, tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu keputusan (Sulistyowati, 2019). Ketidakpastian lingkungan akan menimbulkan ketidakpastian tugas karena kurangnya pemahaman tentang suatu kegiatan dan kurangnya informasi mengenai proses pelaksanaan tugas (Rini et al., 2016). Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat (Rahim & Rahim, 2019). Oleh karena itu para pejabat dalam organisasi pemerintahan harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang yang bisa membawa dampak terhadap perusahaan, lalu memberikan informasi yang bermanfaat ketika dihadapkan pada pembuatan keputusan yang berdampak pada jalannya aktivitas organisasi (Apriliani et al., 2017).

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah ketimpangan informasi yang diperoleh oleh berbagai pihak dalam suatu organisasi yang mengakibatkan setiap elemen dalam organisasi mendapatkan data yang berbeda-beda. Asimetri informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila principal merasa kesulitan menelusuri apayang sebenarnya dilakukan oleh agen (Bestari, 2016). Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri (Manggau, 2016). Ikhsan & Ishak (2005:65), menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dari hubungan prinsipal dan agen adalah bahwa seorang prinsipal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan resiko. Oleh karena itu, seorang bawahan terkadang melakukan senjangan anggaran karena ingin menghindari risiko dengan memberikan informasi yang bias, sehingga ada kemungkinan bahwa asimetri informasi adalah pemicu adanya senjangan anggaran. Menurut Indriastuti et al. (2016) asimetri informasi dapat menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi antara principal yaitu oaring yang memberikan kepercayaan (legislatif) dengan agent yaitu orang yang dipercayakan (eksekutif) terjadi perbedaan informasi atau ketidakkonsistenan dalam penyusunan anggaran disebabkan karena lemahnya koordinasi antara Pemerintah desa dan masyarakat.

Islamic Work Ethics

Islamic work ethics ini awalnya didasarkan pada AlQur'an, ajaran Nabi yang dilambangkan bahwa kerja keras menyebabkan dosa akan diampuni dan warisan dari empat khalifah Islam (Permatasari & Ratnasari, 2020). Menurut Pradana & Mikhriani (2017) Islamic work ethics

adalah seperangkat nilai yang bersumber dari Al Quran dan hadist nabi yang membentuk orientasi mukmin dalam bekerja dan interaksi sosial dengan lingkungan kerjanya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi penting dikarenakan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu yang berpegang pada prinsipnya, tapi etika kerja Islam juga memberi dampak bagi lingkungan kerja secara menyeluruh (Azizah & Ma'rifah, 2018).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian kuantitatif yang berfokus pada perangkat pemerintahan Desa yang tersebar di Kecamatan Rilau` Ale Kabupaten Bulukumba. Diambilnya Desa sebagai populasi dalam penelitian ini, karena Desa merupakan satuan kerja pemerintah sebagai penyusun anggaran, penyelenggara pemerintah yang menyusun, melaporkan laporan keuangan kepada legislatif, dan nantinya akan melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti semakin banyak jumlah partisipan anggaran pada saat proses penyusunan anggaran maka akan semakin besar pula jumlah senjangan anggaran. Bawahan akan melakukan yang terbaik agar supaya anggaran yang mereka susun mudah dicapai dan mengurangi potensi timbulnya risiko senjangan terjadi di masa depan. Partisipasi anggaran menyebabkan munculnya sikap individu positif yaitu adanya peningkatan kinerja atas dorongan motivasi oleh penghargaan (reward) yang diberikan atasan apabila tercapainya target anggaran. Sedangkan perilaku negatif yang mungkin terjadi yaitu terciptanya senjangan anggaran. Partisipasi pada proses penyusunan anggaran, mengakibatkan kemungkinan timbulnya senjangan anggaran akan lebih besar karena partisipan tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan manipulasi terhadap jumlah anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan bahwa praktik kesenjangan anggaran dari perspektif teori keagenan dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen dan prinsipal ketika masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan suatu level kemakmuran yang diinginkan. Partisipasi anggaran merupakan keikutsertaan berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran untuk bersam-sama memberikan pendapat guna menetapkan dan mencapai anggaran yang merupakan tujuan organisasi. Dalam pengaturan anggaran partisipatif, secara tidak langsung bawahan akan berusaha untuk memberikan pengaruh pada kinerja dengan memasukkan kriteria dalam anggaran mereka untuk mencapai apa yang mereka yakini menjadi anggaran yang

dapat dicapai. Alasannya, dengan berpartisipasi individu akan memiliki banyak kesempatan yang dapat digunakan untuk menciptakan senjangan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sutanaya & Sari, (2018), Sandy et al., (2020), dan Wardhana & Gayatri, (2018) yang mengemukakan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat senjangan anggaran.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Ketidakpastian lingkungan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu menebak kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam penyusunan anggaran. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi mengurangi kemampuan individu untuk memprediksi lingkungan secara akurat. Sebaliknya, apabila dalam proses penyusunan anggaran lingkungan dapat diprediksi dengan baik maka kemungkinan tidak terjadi senjangan anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider, menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh adanya internal forces, yaitu faktor yang ada dalam diri individu, dan external forces, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Ketika penyusun anggaran memandang bahwa faktor-faktor yang berpengaruh berada dalam kendali seseorang (internal force), maka orang tersebut akan cenderung bertindak untuk secara optimal memengaruhi organisasi agar dapat mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, ketika menurutnya adalah faktor pengendali tersebut berada di luar kendali organisasi (external force), maka orang itu akan merasa tidak cukup mampu untuk memengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran anggaran yang ingin dicapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan Naraswari & Sukartha, (2019), Sulistyowati, (2019), dan Luhur & Supadmi, (2019) yang menyatakan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat senjangan anggaran.

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Asimetri informasi bisa terjadi karena manajer lebih menguasai informasi mengenai perusahaan dibanding dengan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan anggapan bahwa individu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang ia miliki dapat mendorong seseorang untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh principal. Namun hal ini dapat dikatakan tidak terjadi di Desa Se Kecamatan Rilau Ale. Hal ini bisa terjadi dikarenakan asimetri informasi yang terjadi di lingkungan desa Se Kecamatan Rilau Ale sangat kecil pengaruhnya dan adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap pegawai pemerintahan termasuk aturan yang bersinggungan dengan

informasi informasi yang dimiliki oleh bawahan harus disampaikan kepada atasan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah dimana para kepala Desa ataupun juga para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah orang-orang desa itu sendiri, sehingga orang-orang yang ikut menyusun anggaran itu sendiri tahu persis informasi yang dibutuhkan oleh desa. Selain itu ruang lingkup struktur pemerintahan desa yang sangat sederhana dan pengklasifikasian anggaran yang juga sederhana membuat rincian dari setiap anggaran tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh setiap pegawai desa, sehingga tidak memerlukan penyebaran informasi yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari et al., (2019) dan Kire & Oematan, (2019) yang mengatakan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.

Islamic Work Ethics Mengurangi Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Islamic work ethics tidak dapat mengurangi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, akan tetapi Islamic work ethics berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap Islamic work ethics maka semakin rendah pula tingkat pengaruh terhadap senjangan anggaran. Ketika para partisipan anggaran yang tinggi apabila disertai dengan pemahaman etika kerja Islam maka partisipan anggaran cenderung akan meminimalisir tingkat senjangan anggaran, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic work ethics tidak mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah sangat mendominasinya partisipan anggaran yang hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas yang berjumlah 75% dan hanya ada 18% responden yang berlatar belakang sarjana, namun dalam 18% tersebut hanya ada tiga orang yang memiliki latar belakang sarjana ekonomi, sehingga sebagian besar dari mereka kurang mengerti mekanisme penyusunan anggaran yang baik dan benar. Menurut Rumenser, (2014) sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang didapatkan oleh partisipan anggaran. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan anggaran, maka efektif dalam penyusunan anggaran adalah sumber manusia yakni pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, Keuangan dan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dengan waktu yang relatif lama di bidang penganggaran diperoleh pegawai. Sehingga walaupun partisipan anggaran didukung dengan pemahaman Islamic work ethic yang tinggi belum tentu hal tersebut dapat merubah pemahaman mereka tentang bagaimana cara menyusun anggaran yang baik dan benar dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien.

Islamic Work Ethics Mengurangi Hubungan Antara Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Islamic work ethics dapat mengurangi hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman seorang partisipan terhadap Islamic work ethics maka semakin tinggi pula penolakan seseorang terhadap senjangan anggaran. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang partisipan anggaran yang mengetahui dan menguasai dengan pasti tempat ia bekerja sehingga ia mampu menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada dan cenderung menghindari senjangan anggaran yang dimana dapat menurunnya tingkat keefektifan dan keefesiansian anggaran dalam organisasi tersebut, ditambah ketika partisipan memahami konsep Islamic work ethics yang dimana mengajarkan bahwa kerja adalah sebuah kebajikan, membuat diri seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas profesinya dan melakukan pekerjaannya dengan disertai sikap kejujuran dan keikhlasan maka semakin kecil kemungkinan partisipan melakukan perilaku yang menyimpang. Menurut Heppy & Hadi, (2017) pada penelitiannya bahwa Islamic Work Ethic berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karyawan membutuhkan rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul dimasa depan yang dapat mempengaruhi kinerja masing-masing karyawan, dengan berpegang teguh pada prinsip Islamic work ethics dan bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Islamic Work Ethics Mengurangi Hubungan Antara Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Islamic work ethics tidak dapat mengurangi hubungan antara asimetri informasi terhadap senjangan anggaran, akan tetapi Islamic work ethics berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap Islamic work ethics maka semakin rendah pula tingkat senjangan anggaran. Ketika partisipan memiliki asimetri informasi yang tinggi apabila disertai dengan pemahaman Islamic work ethics, partisipan cenderung menolak terhadap senjangan anggaran, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic work ethics tidak dapat memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Hal ini terjadi karena apabila partisipan anggaran ketahuan melakukan senjangan anggaran melalui asimetri informasi partisipan berpotensi tinggi kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetapnya sehingga rendah atau tingginya pemahaman seorang partisipan terhadap Islamic work ethics tidak akan mempengaruhi tingkat senjangan anggaran dan cenderung akan tetap merahasiakan informasi tersebut, karena dalam fenomenanya bahwasanya para pegawai sangat tidak ingin menya-nyaiakan pekerjaannya berdasarkan pernyataan yang ada dalam kuesioner dimana

hampir dari 100% responden tidak ingin menya-nyiaikan pekerjaannya sebagai pegawai desa dan hanya ada satu responden yang memberikan pernyataan yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun responden memiliki prinsip Islamic work ethics yang cukup namun belum tentu mereka rela untuk memberitahukan informasi yang sebenarnya. Namun dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran di lingkup pemerintahan desa, yang disebabkan karena struktur organisasi pemerintah desa yang cukup sederhana sehingga membuat para aparat desa tetap dapat berkomunikasi dengan baik dan juga aparat pemerintah desa tetap melibatkan para tokoh masyarakat dan BPD (badan permusyawaratan desa untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran dana desa) sehingga seluruh pihak mengetahui informasi yang diperlukan dalam menunjang proses penyusunan anggaran desa.

KESIMPULAN

Partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor penentu senjangan anggaran. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran akan meningkatkan jumlah terhadap senjangan anggaran. Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor penentu peningkatan senjangan anggaran. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan organisasi akan meningkatkan senjangan anggaran. Asimetri informasi bukan merupakan salah satu faktor penentu senjangan anggaran. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya tingkat asimetri informasi tidak akan meningkatkan jumlah senjangan anggaran. Etika kerja islam tidak dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti etika kerja islam yang dimiliki partisipan tidak dapat memperlemah pengaruh partisipan anggaran terhadap senjangan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa Etika kerja islam dapat memoderasi hubungan ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti etika islam yang dimiliki partisipan dapat memperlemah pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran. Etika islam tidak dapat memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti etika islam yang dimiliki partisipan tidak dapat memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, D. A. V., Herawati, N., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Ketidak Pastian Lingkungan terhadap Penyerapan Anggaran dengan Kepribadian Conscientiousness Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1) .

- Arista, T. M., & Syofyan, E. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Psychological Capital Sebagai Variabel Moderasi. *JEA*, 1(2), 666–677.
- Azizah, siti nur, & Ma'rifah, D. (2018). Analisis Pengaruh Etika Kerja Islami Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Pada Karyawan Di Yayasan Al Huda Kebumen. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 1(2), 19–26.
- Baryatdika, M. T., Mafudi, M., & Arofah, T. (2019). Pengaruh Informasi Asimetris terhadap Penciptaan Senjangan Anggaran dengan Faktor-faktor Person-Situation Interactionist sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas). *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 1.
- Basyir, A. A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, dan Kapasitas Individu terhadap Budgetary Slack pada SKPD Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 82–102.
- Bestari, D. S. (2016). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *JOM Fekon*, 3(1), 1437–1447.
- Heppy, H., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Etika Kerj Islam dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kutai Timur). *E-Jurnal Riset Manajemen*, 1–15.
- Hikmahwati, Respat, N. W., Adriani, A., & Mukhlisah, N. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Politeknik Negeri Banjarmasin). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 25–41.
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilfan, B. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Tiga Variabel Moderating. *SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA*.
- Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralits Individu, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 115–130.
- Islami, M. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Timbulnya Kesenjangan Anggaran

- yang Dimodertaing Oleh Gaya Kepemimpinan. JOM Fekon, 3(1), 492–504.
- Kire, T. I. M. B., & Oematan, H. M. (2019). Pengaruh Partisipasi, Penekanan Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Bdgetary Slack (Studi Kasus Universitas Nusa Cendana). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 148–158.
- Kusniawati, H., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack pada SKPD Kota Samarinda. *Akuntabel*, 14(2), 144–156.
- Lubis, & Arfan, I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan (2nd ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Luhur, I. B. S. C., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetri, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 966–996.
- Manggau, A. W. (2016). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 103– 114.
- Naraswari, P. A. R., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1660–1688.
- Nst, A. P., & Kiyah, M. (2019). Pengaruh Partisipasi, Kejelasan Sasaran, Group Cohesiveness Dan Informasi Asimetri Anggaran Terhadap Budgetary Slack Di Seluruh Kecamatan Kota Medan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 139–150.
- Permatasari, S. A. P., & Ratnasari, R. T. (2020). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Loyalitas Karyawan Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 852–860.
- Pradita, E., & Haryanto, H. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 6(3), 1–15.
- Pradana, F. R., & Mikhriani. (2017). Etika Kerja Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Aparatur Negara (Studi Di Kantor Kementrian Agama Kebumen). *JURNAL MD*, 3(1), 35–49.
- Puspitasari, D. S., Djamruhi, A., & Subekti, I. (2017). Anggaran Partisipatif, Senjangan Anggaran, Kinerja Aparatur Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(1), 70–76.

- Putra, I. K. Y. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2016). Karakter Personal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Pada Bank Perkreditan Rakyat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 825–851.
- Putra, I. G. E. D., & Mintoyuwono, D. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada Suku Dinas Pemerintahan Di Dki Jakarta. *Equity*, 20(2), 59–74.
- Putri, A. R. (2018). Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Karyawan Pamella Supermarket Yogyakarta dengan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel Moderasi. *UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*.
- Rahim, M. R., & Rahim, S. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan, dan Penekanan Anggaran sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(3), 241–249.
- Rini, W. S., Ruwanti, G., & Nie, T. F. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Banjarmasin. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 172–191
- Sandy, E. K., Suhendro, & Chomsatu, Y. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Karir Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 1–11.
- Sari, A. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Aruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Budget Emphasis Dan Komitmen Organisasi Terhadap Budgetary S. *E-Jra*, 08(05), 31–43.
- Sodiq, A. (2018). Pengaruh Etika Kerja Islam, Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di KJKS BMT Logam Mulia Grobogan GROBOGAN. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 118–144.
- Sulistiyowati, E. (2019). Pengaruh komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, partisipasi anggaran terhadap kekesenjangan anggaran pada pt. inka di madiun. *Jurnal Akuntansi Jaya Negara*, 11(1), 29–36
- Wulandari, W. R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *JOM Fekom*, 4(1), 16–29.
- Sutanaya, I. M., & Sari, M. M. R. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Rencana Kompensasi Terhadap Senjangan Anggaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 22(1), 775–803.

- Wardhana, A. A. G. W., & Gayatri. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Pada Senjangan Anggaran. *25(3)*, 2098–2128.
- Wati, N. P. D. L. S., & Damayanthi, I. G. A. E. (2017). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan dan Budget Emphasis Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *21(3)*, 2311–2337.
- Yasa, I. G. M., Diatmika, I. P. G., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Self Esteem Terhadap Senjangan Anggaran Desa Di Kecamatan Kabutambahan. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, *8(2)*.
- Windiani, L. P., Sujana, E., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Potensi Timbulnya Budgetary Slack. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *9(2)*, 227–241.
- Young, S. M. (1985). Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack. *Journal of Accounting Research*, *23(2)*, 829–842.